

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Homepage: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps
Vol. 4 No. 1, Juni 2026, halaman: 629~639
E-ISSN: xxxx-xxxx

Dilema Etik Guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Dwi Oktadinata[1], Susi Fitri[2], Eka Wahyuni[3]
Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
[1*]Email penulis koresponden: dwioktadinatas2@gmail.com

Riwayat Artikel

Submited: 22-11-2026
Accepted: 23-11-2026
Published: 23-11-2026

Abstrak

Dilema etik dapat terjadi pada setiap profesi termasuk guru Bimbingan dan Konseling (BK). Hasil penelitian terdahulu menemukan adanya dilema etik yang hampir sama yang dialami konselor sekolah di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang perlu diperhatikan serta strategi yang diperlukan oleh tenaga kesehatan mental di lingkup pendidikan. Penelitian ini mengidentifikasi dilema etik yang dihadapi guru BK di Indonesia. Melalui survey yang melibatkan 219 partisipan dan wawancara kepada 20 narasumber dari berbagai wilayah di Indonesia, ditemukan 9 (sembilan) dilema etik yang dihadapi guru BK di Indonesia, yaitu : benturan terhadap aturan sekolah, konflik rekan sejawat, konflik dengan orang tua, benturan prinsip etik, keterbatasan kompetensi, melanggar batas kerahasiaan, menerima tugas di luar tugas dan fungsi BK, menghadapi permintaan tidak etis, dan berhadapan dengan hukum. Temuan ini menguatkan perlunya membangun kesadaran hingga pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik bagi guru BK di Indonesia.

Kata kunci: bimbingan dan konseling; dilema etik; guru BK; konselor sekolah.

Abstract

Ethical dilemmas can arise in any profession, including Guidance and Counseling (BK) teachers or school counselor. Research has found that school counselors around the world face similar ethical dilemmas. This indicates there are conditions that require attention and strategies needed by mental health professionals in the school environment. This study identifies the ethical dilemmas faced by school counselors in Indonesia. Through a survey involving 219 participants and Interviews with 20 informants from various regions in Indonesia, this study identified nine ethical dilemmas faced by school counselors in Indonesia, namely: conflicts with school regulations, conflicts with colleagues, conflicts with parents, conflicts of ethical principles, limitations in competence, breaches of confidentiality, accepting tasks outside the scope of guidance and counseling duties, dealing with unethical requests, and legal challenges. These findings emphasize the need to foster awareness and decision-making skills in addressing ethical dilemmas for school counselors in Indonesia.

Keywords: *Ethical Dilemma, guidance and counseling; guidance and counseling teacher; school counselor*

Prosiding ***Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Negeri Jakarta*** *diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta*



PENDAHULUAN

Dilema etik adalah situasi yang menghambat atau membingungkan konselor karena (a) terdapat standar etika yang bertentangan atau saling bertabrakan yang berlaku, (b) terdapat konflik antara apa yang etis dan moral, (c) situasi tersebut sedemikian rupa sehingga

kompleksitasnya membuat penerapan standar etika menjadi tidak jelas, atau (d) keadaan lain yang mencegah penerapan standar etika secara jelas (Cottone & Tarvydas, 2016). Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan Kitchener (2000) bahwa dilema etik adalah sebuah masalah di mana tidak ada pilihan yang tampak sepenuhnya memuaskan, karena ada alasan yang baik, tetapi bertentangan untuk mengambil tindakan yang saling bertentangan dan tidak kompatibel. Masing-masing alasan dapat dibela sebagai pilihan yang layak dan tepat seperti yang dinyatakan Weinberg, 2009 dalam (Marson & McKinney, 2019).

Dilema etis sering ditandai oleh konflik antara etika, nilai, moral, hukum, aturan, atau kebijakan lembaga (Barsky, 2010). Menghadapi kondisi ini, praktisi diharapkan dapat memperhatikan standar etik yang merujuk kepada standar yang tertuang pada kode etik profesi sehingga tidak terjadi pelanggaran etik. Karena meskipun dilema etik menimbulkan ketidakjelasan mengenai pilihan yang harus dilakukan, tetapi pelanggaran etik adalah sebuah tindakan yang jelas melanggar aturan etik tertentu. Pada umumnya orang mungkin berpikir bahwa ketika istilah pelanggaran etik terjadi, hal itu merujuk kepada pelanggaran kode etik yang ekstrim, namun dalam praktik konseling, pelanggaran etis dapat saja terjadi tanpa disadari atau tidak disengaja. Dilema etik bukanlah kegagalan dari kode etik, melainkan indikator alami dan tepat akan pentingnya penilaian profesional. Kebutuhan untuk menggunakan penilaian etis adalah pengakuan bahwa seseorang terlibat dalam "praktek sebuah profesi," bukan sekadar "melakukan pekerjaan," meskipun sangat terampil (Cottone & Tarvydas, 2016).

Terdapat beragam dilema etik yang digambarkan pada beberapa hasil penelitian kepada tenaga profesional di bidang kesehatan mental termasuk psikolog sekolah dan konselor sekolah meskipun tidak semua bentuk dilema tersebut dihadapi guru BK di Indonesia. Terkadang kehadiran dilema etik ini tidak disadari oleh guru BK sehingga banyak guru BK atau konselor sekolah yang gagal mengidentifikasi dilema ini pada kasus yang sedang ditangani. Ragam tantangan etika guru BK ini dirangkum Williams et al. (2023) dalam tulisannya berdasarkan penelitian para peneliti sebelumnya, yang menggambarkan bahwa konselor sekolah sering menghadapi tantangan etika dalam pekerjaan mereka karena peran unik mereka sebagai pendidik dan profesional kesehatan mental. Tantangan ini dapat mencakup ketidakpastian seperti (a) harapan dan kebutuhan yang bertentangan, (b) menangani kompetensi profesional, (c) menjaga kerahasiaan sambil mematuhi kebijakan sekolah, (d) menghormati hak orang tua/wali, menyeimbangkan kode etik dengan persyaratan hukum yang bertentangan, dan (e) menangani kebijakan sekolah dan standar komunitas yang berbeda dari etika dan standar etika profesional seseorang.

Berdasarkan kajian lainnya, terdapat beberapa dilema etik yang paling sering dihadapi tenaga kesehatan mental di sekolah, yang dikelompokkan dalam lima tema, yaitu : (1) kerahasiaan, (2) pelaporan kasus, (3) kompetensi, (4) batasan profesional, dan (5) peran ganda (Oktadinata et al., 2026). Dilema etik yang dihadapi guru BK atau konselor sekolah diberbagai negara sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun beberapa dilema etik yang unik seperti temuan G. S. Johnson & Purgason (2021) terkait murid yang tidak berdokumen dan melaporkan dugaan penyalahgunaan obat terlarang atau pengabaian anak belum menjadi bahasan yang ditemukan dalam penelitian dilema etik bagi guru BK di Indonesia. Pada penelitian lainnya, dilema etik yang dihadapi konselor sekolah saat ini makin meluas, dengan hadirnya tantangan baru yang melibatkan teknologi, penyimpanan catatan, isu sosial kontemporer dan perkembangan sosial media (Brown & Armstrong, 2022).

Ketidakmampuan dalam menghadapi dilema etik tidak hanya dapat merugikan murid, tetapi juga institusi dan organisasi serta kepercayaan masyarakat (Mansaray et al., 2020). Selain itu hal ini juga berpotensi meningkatkan tekanan pekerjaan dan mempengaruhi kesejahteraan pada guru itu sendiri. Pada sebuah penelitian terhadap 310 guru di Finlandia, ditemukan bahwa kelompok guru yang sering menghadapi dilema, mengalami tingkat kelelahan tertinggi jika dibandingkan dengan guru yang jarang atau hanya menghadapi dilema tertentu saja (Heikkilä et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dilema etik perlu mendapatkan perhatian baik dari guru BK sebagai tenaga pelaksana maupun lembaga profesi yang menaungi peran guru BK di sekolah.

Pentingnya pengetahuan mengenai dilema etik ini, akan membantu guru BK dalam mengambil keputusan sesuai etik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika guru BK menghadapi berbagai kasus dan menyadari bahwa kasus tersebut menghadirkan dilema etik, maka pengambilan keputusan dalam proses penanganan kasus juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah-langkah etis termasuk mengedepankan prinsip etik dan kode etik profesi yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini juga menjadi gambaran kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki guru BK. Berdasarkan kode etik yang dikeluarkan ABKIN, kompetensi pengetahuan dan keterampilan magister lebih mendalam dibandingkan sarjana. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi latar belakang pendidikan guru BK maka semakin tinggi tuntutan kompetensi yang seharusnya dapat ditampilkan, terutama nilai-nilai profesional yang menjadi landasan perilaku etis dan pengambilan keputusan (ABKIN, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di awali dengan survey yang melibatkan 219 guru BK dan wawancara semi-terstruktur. Proses analisis data dipandu oleh pendekatan teori dasar konstruktivis (Charmaz, 2014). Sejalan dengan sifat iteratif dari metodologi ini, analisis dimulai segera setelah wawancara tahap pertama dan terus berjalan bersamaan dengan pengumpulan data. Keterlibatan secara simultan dengan pengumpulan dan analisis data memungkinkan perbandingan terus-menerus serta munculnya kode dan kategori awal. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak MAXQDA 24 untuk mendukung efektivitas analisis data. MAXQDA memiliki beberapa keunggulan untuk mengelola dan menganalisis penelitian kualitatif seperti proses koding, klasifikasi data, memvisualisasikan pola dan tema, serta melakukan analisis konten kuantitatif maupun metode campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mendapatkan ragam dilema etik yang dihadapi guru BK di Indonesia. Survey mengenai dilema etik melibatkan 219 partisipan yang merupakan guru BK dari berbagai wilayah di Indonesia. Partisipan penelitian ini didominasi guru BK berjenis kelamin perempuan sebesar 77% (N = 169) dengan rentang usia paling tinggi > 40 tahun sebanyak 43% (N = 94). Pada umumnya, latar belakang pendidikan partisipan adalah S1 sebanyak 76.3% (N = 167) dan S2 sebanyak 23.7% (N = 52). Masa kerja partisipan juga bervariasi antara < 1 tahun (2%), 1 - 5 tahun (19), 6 – 10 tahun (20%), 11 – 15 tahun (26%) dan > 15 tahun (34%). Sebagian besar bertugas pada jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat sebanyak 63.9% (N = 140), SMP/Sederajat 32.4% (N = 71), SD 1.8% (N = 4) dan terdapat 4 partisipan bertugas di dua jenjang pendidikan sekaligus.

Tabel 1. Karakteristik Demografi Partisipan Survey Penelitian

Variabel	**N**	**%**	**Variabel**	**N**	**%**
Jenis Kelamin			*Masa Kerja (dalam tahun)*		
L	50	23	< 1	4	2
P	169	77	1 – 5	41	19
Usia (dalam tahun)			6 – 10	43	20
< 25	17	3	11 – 15	56	26
25 – 30	28	13	> 15	75	34
31 – 35	46	21	*Satuan Pendidikan/Tempat Tugas*		
36 – 40	44	20	SD	4	1.8
> 40	94	43	SMP	71	32.4
Pendidikan Terakhir			SMA	140	63.9
S1	167	76.3	SD & SMA	1	0.5

S2	52	23.7	SMP & SMA	3	1.4

Pada umumnya partisipan penelitian juga terlibat pada organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) baik sebagai anggota maupun pengurus dalam organisasi tersebut. Survey ini juga mendata kesediaan partisipan untuk terlibat dalam wawancara penelitian yang dicantumkan pada bagian akhir kuesioner yang telah disebarkan.

Perspektif dan Dilema Etik Guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Kasus-kasus yang terjadi secara umum di sekolah, pada dasarnya cenderung serupa, namun keterlibatan beberapa faktor lainnya dapat mempengaruhi kompleksitas masalah, seperti yang divisualisasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kasus yang menghadirkan dilema

Beberapa kasus menghadirkan dilema yang sering disebutkan narasumber diantaranya ; penugasan diluar tupoksi guru BK, tidak sesuainya alur penanganan kasus, kasus asusila, rendahnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak, dan pelanggaran tata tertib sekolah. Selanjutnya beberapa kasus yang tidak intens terjadi namun menghadirkan dilema etik diantaranya ; kasus kekerasan seksual, masalah dengan rekan sejawat, tekanan kekuasaan, hingga kasus kekerasan pada anak. Pada umumnya kasus-kasus yang kompleks menjadi pemicu emosi negatif yang mendominasi ungkapan perasaan para narasumber ketika menceritakan kasus-kasus yang dianggap menghadirkan dilema etik. Perasaan bingung, takut, khawatir, dan cemas sering diungkapkan saat guru BK menangani kasus murid berbenturan dengan hukum.

Berdasarkan pengalaman para narasumber, ditemukan 9 (sembilan) kategori dilema etik dari berbagai situasi yang pernah mereka hadapi seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini :

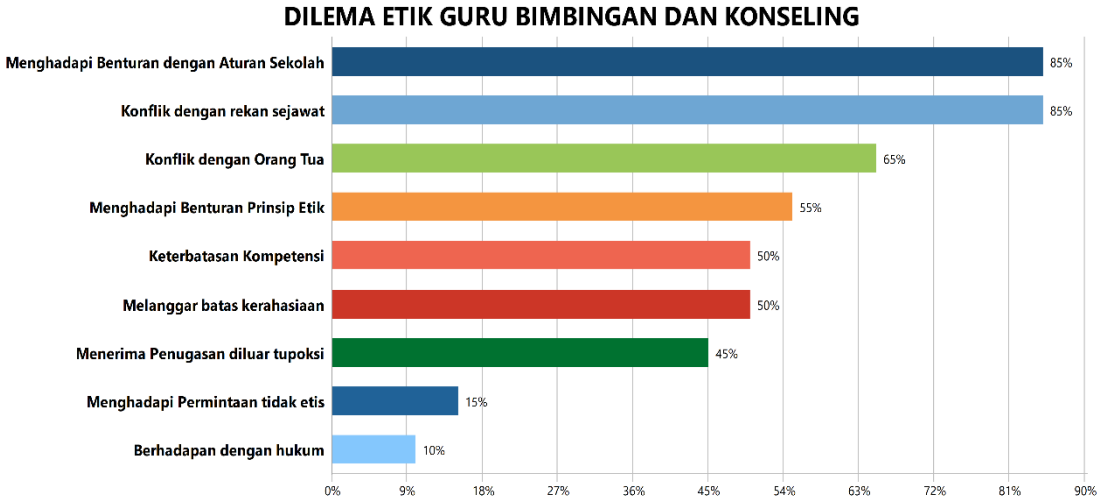

Gambar 2. Dilema Etik Guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Kategori dilema etik dalam penelitian ini, muncul secara bertahap dari berbagai kode awal (*initial coding)* yang membentuk kode terfokus (*focused coding)*, pada transkripsi wawancara menguatkan temuan survey sebelumnya. 85% narasumber mengemukakan hambatan dalam mengedepankan kepentingan terbaik murid yang mengalami benturan terhadap aturan sekolah dan konflik rekan sejawat. Dilema etik berikutnya adalah konflik dengan orang tua (65%), benturan prinsip etik (55%), keterbatasan kompetensi (50%), melanggar batas kerahasiaan (50%), menerima tugas di luar tugas dan fungsi BK (45%), menghadapi permintaan tidak etis (15%), dan berhadapan dengan hukum (10%).

Setiap kategori terbentuk dari situasi yang dipaparkan narasumber saat menghadapi kasus yang menghadirkan dilema etik. Setiap kasus dapat menghadirkan dilema etik yang berbeda bahkan dapat lebih dari satu konflik dilema etik. Konflik ini didominasi oleh situasi membingungkan yang diungkapkan narasumber ketika menghadapi kasus murid bermasalah dengan aturan sekolah, pimpinan, rekan sejawat, dan orang tua. Situasi semakin kompleks apabila masalah yang dihadapi berbenturan dengan faktor lainnya seperti benturan dengan guru yang berstatus guru senior atau sebagai salah satu orang tua murid yang berkonflik. Situasi-situasi ini dirangkum pada tabel yang merupakan hasil kodifikasi dari wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 2. Dilema Etik Guru BK di Indonesia

KATEGORI DILEMA ETIK	KODE TERFOKUS (*Focused Coding)*
Menghadapi Benturan dengan Aturan Sekolah	Konflik Prinsip Etik dengan Peraturan/Kebijakan Sekolah
	Benturan kekuasaan dengan peraturan sekolah
	Konflik peran guru BK dengan aturan sekolah
	Konflik Kebijakan Pemerintah dengan Kebijakan Sekolah
Konflik dengan rekan sejawat	Menghadapi guru bersikap tidak etis
	Konflik dengan Pimpinan/Manajemen Sekolah
	Konflik profesionalisme guru BK dengan relasi sosial
	Konflik melindungi murid dengan menjaga hubungan kerja
	Menghadapi Dual Relationship
Konflik dengan Orang Tua	Menghadapi otoritas orang tua
	Menghadapi Orang tua bersikap tidak etis

	Mengalami Kesulitan berkomunikasi dengan orang tua
	Mendeteksi Kesulitan Finansial
Menghadapi Benturan Prinsip Etik	Konflik keadilan dengan otonomi murid
	Konflik *beneficence* dengan *non-maleficence*
	Konflik Kebaikan dan Keadilan
	Konflik *non maleficence* dengan keadilan
	Konflik kebaikan dengan otonomi (murid)
	Konflik kerahasiaan dan tanggung jawab kepada publik
Keterbatasan Kompetensi	Konflik prinsip etik dengan Keterbatasan guru BK untuk membantu murid
	Mengalami kebingungan menghadapi konseli dan orang tua
	Melakukan intervensi di luar keahlian
	Ketidakmampuan dalam melakukan layanan advokasi
	Ketidakmampuan membuat batasan *(boundaries*)
	Kesulitan mengumpulkan informasi
	Keterbatasan mendalami kondisi murid
Melanggar batas kerahasiaan	Konflik kerahasiaan dengan Peraturan Sekolah
	Konflik kerahasiaan dan Keselamatan konseli
Menerima Penugasan di luar tupoksi	Mengalami eksploitasi beban kerja sebagai dampak kinerja baik
	Menghadapi multi peran
Menghadapi Permintaan tidak etis	Meminta guru BK menasehati orang tua
	Memposisikan guru BK sebagai muara penyelesaian masalah
Berhadapan dengan hukum	Meminta guru BK mengeluarkan murid
	Mendampingi murid di pengadilan
	Menjadi saksi tanpa perlindungan hukum

Menghadapi Benturan dengan Aturan Sekolah

Peran guru BK sebagai tenaga profesional di sekolah yang bertanggung jawab dalam mendampingi perkembangan murid sangat rentan konflik terutama ketika masalah yang dihadapi berbenturan tata tertib maupun kebijakan lainnya yang ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat individu di dalamnya. Guru BK kesulitan saat dihadapkan pada pilihan mengedepankan kepentingan terbaik murid untuk menyelesaikan pendidikannya dengan peraturan tata tertib sekolah yang mengkategorikan kasus kehamilan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua. Pada kondisi lain, benturan prinsip etik dengan peraturan juga terjadi disaat guru BK mempertimbangkan kesempatan bagi murid untuk melakukan perubahan, namun sanksi yang ditetapkan berseberangan, terutama pada sekolah yang menetapkan sanksi pelanggaran berupa poin. Akumulasi perhitungan poin ini menjadi penentu apakah murid dapat dipertahankan atau dikeluarkan, meskipun kasus yang terjadi bukan termasuk pelanggaran berat.

Dilema etik terkait benturan peraturan sekolah dengan kekuasaan/jabatan dialami oleh beberapa narasumber lainnya yang menggambarkan kesulitannya menyelesaikan kasus karena intervensi dinas pendidikan melalui kepala sekolah. Mereka mengungkapkan bahwa kepala sekolah tidak dapat menolak permintaan dinas pendidikan untuk menerima murid tertentu bahkan dengan kasus pelanggaran berat atau tetap menaikan murid yang bermasalah secara akademik hingga menarik kembali keputusan terhadap murid yang dinyatakan sudah dikeluarkan. Menyikapi kondisi ini, sekolah mengaburkan istilah 'mengeluarkan' murid dengan 'permohonan/permintaan mengundurkan diri' untuk menyamarkan keputusan mengeluarkan murid dari sekolah

Konflik dengan Rekan Sejawat

Berdasarkan pengalaman para narasumber, berbagai dilema etik yang melibatkan rekan sejawat, menghadirkan kesulitan bagi guru BK untuk menjaga keseimbangan etis dan relasi kerja. Beberapa narasumber menyebutkan merasa terkejut melihat sikap rekan kerja baik guru mata pelajaran maupun guru BK yang dianggap tidak etis, seperti mengabaikan kasus murid, tidak menegakkan prosedur penanganan kasus, pemberian sanksi yang berlebihan, mengeluarkan pernyataan tidak baik, menceritakan kasus murid tanpa izin, hingga melakukan tindak kekerasan kepada murid. Konflik dengan rekan sejawat juga kerap muncul pada situasi yang membuat guru BK kesulitan dalam bersikap disaat berupaya melindungi murid sekaligus menjaga hubungan kerja.

Konflik dengan pimpinan/manajemen sekolah juga ditunjukkan dari pengalaman beberapa guru BK. Kesulitan yang dihadapi guru BK terkait pimpinan terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat dalam menangani masalah, tidak dilibatkan dalam menangani masalah murid dan merasa tidak mendapat perlindungan atau dukungan dari pimpinan. Pada situasi ini, guru BK menghadapi benturan antara bersikap profesional sesuai kode etik namun disisi lain guru BK juga merupakan bagian dari struktur birokrasi sekolah yang cenderung harus patuh pada kebijakan pimpinan sebagai penanggung jawab di sekolah. Konflik rekan sejawat menghadirkan beragam kekhawatiran bagi guru BK, terutama jika terkait pada kebijakan kepala sekolah selalu pemegang otoritas tertinggi meskipun beberapa kepala sekolah merupakan rekan yang pernah menjadi tenaga pendidik pada sekolah sebelumnya atau berada pada usia dan masa kerja yang tidak jauh berbeda.

Konflik dengan Orang Tua

Salah satu kategori dilema etik yang dominan dihadapi guru BK adalah konflik dengan orang tua, mengingat status konseli yang masih berada di bawah otoritas orang tua/wali. Konflik terhadap otoritas orang tua dominan terjadi pada kasus-kasus seperti, orang tua memilih untuk menikahkan murid, memutuskan untuk menghentikan proses konseling setelah dirujuk ke tenaga ahli, tidak menindaklanjuti kasus pelecehan pada anak, melibatkan pihak ketiga secara sepihak, memutuskan untuk mengeluarkan atau memindahkan anak dengan kasus pelanggaran berat meski telah diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan ataupun mendukung anak untuk bekerja daripada sekolah. Berdasarkan berbagai kasus yang dikemukakan narasumber, terkait konflik dengan orang tua pada murid, beberapa aspek seperti latar belakang pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga dan kultur sosial budaya menjadi temuan faktor pencetus situasi dilematis bagi guru BK. Pada kasus lainnya, narasumber mengemukakan kebingungan menghadapi orang tua yang menampilkan perilaku tidak etis di sekolah, seperti menggunakan kekuasaan untuk membela anak saat melakukan pelanggaran di sekolah atau bersikap agresif dengan melakukan kekerasan pada murid saat proses konseling berlangsung.

Menghadapi Benturan Prinsip Etik

Meskipun pada umumnya narasumber tidak menyebutkan prinsip etik yang saling berbenturan, namun istilah yang mereka gunakan dalam menggambarkan kebingungan yang dirasakan mewakili prinsip etik dasar seperti otonomi (*autonomy),* kebaikan (*beneficence),* tidak merugikan (*non-maleficence),* keadilan (*justice),* kebenaran (*veracity),* fidelity (*kesetiaan)* dan tanggung jawab publik (*public responsibility).* Salah satu kasus yang dikemukakan narasumber dalam penelitian ini adalah saat mengetahui kasus murid yang mengalami pelecehan dari ayah kandungnya dan meminta agar tidak diberitahukan kepada orang lain termasuk ibunya. Kondisi ini membuat guru BK dihadapkan pada pilihan untuk menyimpan kasus tersebut karena mempertimbangkan permintaan dari murid menunjukkan penghargaan terhadap otonomi murid meskipun disaat bersamaan pilihan ini terlihat tidak memberi keadilan kepada pemenuhan hak anak pada murid yang bersangkutan.

Keterbatasan Kompetensi

Keterbatasan kompetensi merupakan tema yang muncul sebagai salah satu kategori dilema etik yang menggambarkan keterbatasan yang disadari guru BK dalam memberikan layanan BK kepada murid. Situasi-situasi yang diungkapkan oleh narasumber menunjukan adanya hambatan dalam upaya pemberian bantuan, baik untuk terlibat secara intensif pada sebuah masalah ataupun hambatan dalam memberikan intervensi yang tepat karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pada salah satu kasus, guru BK menggambarkan kebingungannya memilih teknik konseling yang tepat, dan akhirnya memilih untuk bersikap tegas dengan memberi hukuman fisik meskipun memahami bahwa hal ini merupakan pelanggaran etik. Para narasumber pada umumnya menunjukkan kesadaran terhadap keterbatasan yang dimilikinya, namun kesadaran ini ditampilkan setelah sejumlah tindakan dilakukan yang menunjukkan lemahnya pertimbangan konsekuensi pada kondisi yang memaksa guru BK bertindak di luar kompetensinya. Terkait kompetensi guru BK, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk organisasi profesi untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan definisi kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), dan nilai-nilai (*values*) yang dimiliki seseorang yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Melanggar Batas Kerahasiaan

Dilema etik terkait kerahasiaan merupakan dilema yang sering disebutkan dalam berbagai penelitian sebelumnya. berdasarkan analisis pada hasil wawancara, didapatkan dua situasi yang paling sering membuat guru BK melanggar batas kerahasiaan, yaitu saat kerahasiaan berbenturan dengan aturan sekolah dan saat kerahasiaan berbenturan dengan keamanan murid itu sendiri. Guru BK mengalami kebingungan disaat menghadapi pengakuan murid yang mengaku telah merusak ruang kelas karena marah dengan salah satu guru di sekolahnya dan meminta guru BK untuk merahasiakannya. Pada situasi ini, guru BK menghargai kejujuran murid, namun terpaksa melaporkan kepada pihak sekolah dengan tetap berupaya memenuhi hak-hak murid seperti keamanan dan kondisi psikologisnya. Disisi lain, beberapa guru BK tetap memilih merahasiakan kasus-kasus tertentu, dengan alasan mengedepankan asas kerahasiaan yang justru sebenarnya dapat membahayakan murid. Seorang narasumber menceritakan bahwa dirinya memilih untuk merahasiakan pelecehan yang dialami muridnya dan tidak menyadari bahwa terdapat potensi berbahaya karena pelaku berada di dekat korban.

Menerima Penugasan di luar Tupoksi

Dilema etik terkadang hadir akibat dari kumpulan beberapa kasus yang menghadirkan lebih dari satu dilema. Beberapa narasumber menceritakan, bahwa dirinya tidak dapat menghindar untuk merangkap tugas lain yang ditugaskan seperti wali kelas, bendahara barang dan berbagai kepanitian dalam berbagai kegiatan sekolah, karena keterbatasan guru di sekolahnya. Kondisi ini membuat mereka merasa bersalah karena tidak optimal dalam melakukan layanan konseling terhadap murid. Banyaknya tanggung jawab yang dibebankan, rentan membuat guru BK mengalami kelelahan kerja (*burnout),* terutama pada guru BK yang tidak memiliki sistem pendukung *(support system)* untuk mengakomodir beban kerja dan psikologis.

Menghadapi Permintaan Tidak Etis

Kategori dilema etik terkait permintaan tidak etis pada umumnya terjadi ketika pihak lain seperti pimpinan/manajemen sekolah, rekan sejawat, ataupun orang tua meminta guru BK melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi, regulasi hukum maupun hal-hal yang dapat merugikan peserta didik. Situasi ini sulit dihindari, karena guru BK rentan berhadapan dengan ketimpangan relasi kuasa yang membuatnya terkadang harus mematuhi otoritas terentu. Pada beberapa kasus, guru BK menghadapi kebingungan ketika diminta mengeluarkan murid bermasalah, atau sebaliknya diminta menyampaikan penerimaan kembali murid yang telah dinyatakan dikeluarkan. Guru BK juga menghadapi dilema ketika diminta

menceritakan kasus murid tertentu terutama pada forum rapat kenaikan kelas. Penolakan guru BK pada beberapa permintaan yang bertentangan dengan kode etik kerap menjadikan guru BK dianggap membangkang sehingga menimbulkan konflik dengan rekan sejawat bahkan pimpinan/manajemen sekolah.

Berhadapan dengan Hukum

Beberapa kasus yang terjadi dapat menyebabkan guru BK harus berhadapan dengan hukum baik sebagai pendamping maupun sebagai saksi dalam kasus rekan sejawat. Guru BK merasa tertekan, saat harus menceritakan kasus yang ditanganinya di hadapan penyidik ataupun di pengadilan karena merasa tidak memilliki perlindungan hukum yang memadai baik dari manajemen sekolah maupun dari organisasi profesi. Beberapa guru BK menyebutkan bahwa mereka berani berhadapan dengan hukum karena rasa kemanusiaan meskipun terdapat resiko-resiko lain yang mereka khawatirkan. Pada umumnya narasumber menyebutkan tidak terlibat lebih dalam jika kasus telah ditangani pihak berwajib dan hampir semua murid akan dikeluarkan ketika berhadapan dengan hukum sesuai peraturan tata tertib sekolah.

Ragam dilema etik yang dihadapi guru BK di Indonesia, tentu perlu menjadi perhatian baik oleh guru BK itu sendiri maupun oleh organisasi profesi. Pola penanganan kasus yang mengedepankan pertimbangan pribadi semata menunjukkan ketidaksiapan guru BK saat menangani kasus yang menghadirkan dilema etik. Jika dilema etik tidak dapat dihadapi, hal itu dapat menjadi pelanggaran etik (Camadan et al., 2021). Kesadaran mengenai dilema etik pada guru BK perlu ditumbuhkembangkan, sehingga guru BK dapat mengambil keputusan secara tepat. Keputusan-keputusan ini dapat dibentuk dari pertimbangan kepentingan pribadi, hukum, etika, adat dan tradisi, dan orang-orang dalam peran profesional yang tunduk pada kode etik mungkin akan mempertimbangkan kode-kode tersebut dalam pengambilan keputusan mereka (Copp, 2006). Menghadapi keterbatasan kode etik dan fakta bahwa terdapat dilema etik nyata yang melibatkan keputusan antara kewajiban etik yang saling bersaing, sangat penting bagi seorang guru BK untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengambilan keputusan etik (Oktadinata, 2026).

KESIMPULAN

Dilema etik guru BK di Indonesia menggambarkan adanya kondisi yang sulit ketika menyeimbangkan prinsip etik, dampak dan tekanan yang tidak dapat dihindari termasuk ketimpangan relasi kuasa dan penyalahgunaan kekuasaan (*power abuse)*. Penurunan keterampilan atau keahlian profesional (*deskilling)* pada guru BK akibat kebijakan struktural atau tekanan institusi dapat mereduksi peran mereka menjadi sekedar penjaga ketertiban dan pemenuhan administratif. Benturan antara bersikap etis dan realitas sosial budaya adalah hal yang tidak dapat dihindari, ketika guru BK berupaya mengoptimalkan perannya dalam mengedepankan kepentingan terbaik murid. Oleh karena itu, sebagai pembimbing di lapangan, guru BK sangat memerlukan dukungan, baik berupa edukasi mengenai peran guru BK kepada pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, serta pimpinan dan rekan sejawat di sekolah maupun mekanisme advokasi hukum sebagai perlindungan profesi bagi guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, untuk membantu guru BK memandang dan mempertimbangkan situasi dilematis yang sedang dihadapi, diperlukan pengambilan keputusan dilema etik, agar mereka mampu mengembangkan respon yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*.

Barsky, A. E. (2010). *Ethics and Values in Social Work*. Oxford University Press, Inc.

Brown, T. A., & Armstrong, S. A. (2022). Use of ethical decision-making Models among school counselors. *Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research*, *49*(1), 34–45.

https://doi.org/10.1080/15566382.2022.2073176
Camadan, F., Topsakal, C., & Sadlkoğlu, I. (2021). An examination of the ethical dilemmas of school counsellors: Opinions and solution recommendations. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, *31*(1), 76–93. https://doi.org/10.1017/jgc.2020.16
Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory | SAGE Publications Ltd*. SAGE Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/constructing-grounded-theory/book235960
Copp, D. (2006). The Oxford handbook of ethical theory. In *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195147790.003.0018
Cottone, R. R., & Tarvydas, V. M. (2016). *ETHICS AND DECISION MAKING IN COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY* (4th ed.). Springer Publishing Company.
Heikkilä, M., Mauno, S., Herttalampi, M., Minkkinen, J., Muotka, J., & Feldt, T. (2023). Ethical dilemmas and well-being in teachers' work: A three-wave, two-year longitudinal study. *Teaching and Teacher Education*, *125*, 104049. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104049
Johnson, G. S., & Purgason, L. L. (2021). School counselors' experiences with ethical decision making. *Professional School Counseling*, *25*(1), 2156759X211018640. https://doi.org/10.1177/2156759x211018640
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 17/B/HK.03.01/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Memberikan Layanan Bimbingan aan/atau Konseling Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar* (pp. 1–43). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kitchener, K. S. (2000). Foundations of Ethical Practice, Research, and Teaching in Psychology. In *Foundations of Ethical Practice, Research, and Teaching in Psychology*. Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410601100
Mansaray, M. F., Komba, E., & Mani, F. (2020). The Importance of Ethical Codes in Guidance and Counseling Profession. *International Journal of Scientific Engineering and Science*, *4*(8), 14–18. http://ijses.com/
Marson, S., & McKinney, R. (2019). *The Routledge Handbook of Social Work Ethics and Values*. Routledge, Taylor & Francis Group.
Oktadinata, D., Fitri, S., & Wahyuni, E. (2026). *SCHOOL COUNSELOR ' S ETHICAL DILEMMA : SCOPING REVIEW*. *7*(2), 377–388.
Oktadinata, D. (2026). *Model Pengambilan Keputusan Dilema Etik Guru Bimbingan dan Konseling.* Tesis. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta
Williams, M. K., Maddox, R. P., Hunt, T., Frank, A., Rujimora, J., Nichols, L., & Summers, H. (2023). Demystifying Tele-Counseling: Meeting Student Needs Through Ethical Decision-Making and Collaborative Consultation. *Journal of Special Education Technology*, *39*(3), 415–419. https://doi.org/10.1177/01626434231198227

BIODATA PENULIS KORESPONDEN



Dwi Oktadinata, lahir di Martapura, 18 Oktober 1983, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dan menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota Bandar Lampung dan Jakarta. Penulis merupakan ibu dari tiga orang anak : Callysta Azka Aurellia Amsyar, Dzaki Adli Alifiandra Amsyar dan Elmeera Assyifa Ananda Amsyar. Pada tahun 2006, penulis menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan bertugas pertama kali sebagai guru BK di SMP Labschool Kebayoran, Jakarta. Karir sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) dimulai pada tahun 2011 di SMAN 5 Kota Bengkulu (2011 – 2017) dan SMAN 4 Kota Jambi (2017 – sekarang). Penulis memiliki ketertarikan pada bidang manajemen dan komunikasi serta aktif menjadi narasumber dan fasilitator dalam berbagai pelatihan, seminar, serta kegiatan edukasi yang ditujukan bagi remaja, guru, orang tua, mahasiswa, pendidik dan masyarakat umum. Penulis dapat dihubungi melalui email: dwioktadinatas2@gmail.com atau melalui whatsapp: 089624556696